

**PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA**

**TAHUN 2017**

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DESA 2017**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada huruf a ayat (1) Pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ayat (4) Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa antara lain adalah Pendapatan asli Desa yang digunakan untuk Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa didanai dari APBDesa, sehingga Kepala Desa untuk melaksanakan kewenangannya harus menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa;

1. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Dagan tentang Sumber Pendapatan Asli Desa menjadi Peraturan 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 20);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 7 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Pemerintahan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DAGAN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

# BAB : II

# JENIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA

Pasal 2

Jenis Pendapatan Asli Desa meliputi :

1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Kekayaan Desa
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi
4. Hasil Gotong Royong
5. Hasil Pungutan Desa
6. Lain Lain pendapatan Asli Desa Yang Sah.

## Pasal 3

Besarnya sumber pendapatan asli desa dan rincian dari tiap jenis pendapatan asli desa tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

# BAB III

# PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Asli Desa Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Dalam melaksanakan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa Lainnya dan atau pihak lain yang ditetapkan menggunakan Keputusan Kepala Desa.
3. Mekanisme pemungutan ditetapkan lebih lanjut menggunakan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Hasil dari Pemungutan Pendapatan Asli Desa dimasukkan dalam Buku Kas Desa dan rencana penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

# BAB : IV

SANKSI

Pasal 6

1. Setiap warga masyarakat yang melanggar dan atau mengabaikan ketentuan Peraturan Desa ini dikenakan sanksi sampai pada kewajibannya dipenuhi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah desa dan ditetapkan menggunakan keputusan kepala desa

# BAB V

# KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Dagan

Pada tanggal : 2 januari 2017

Kepala Desa Dagan

HJ.SUKARNI, S.Sos.

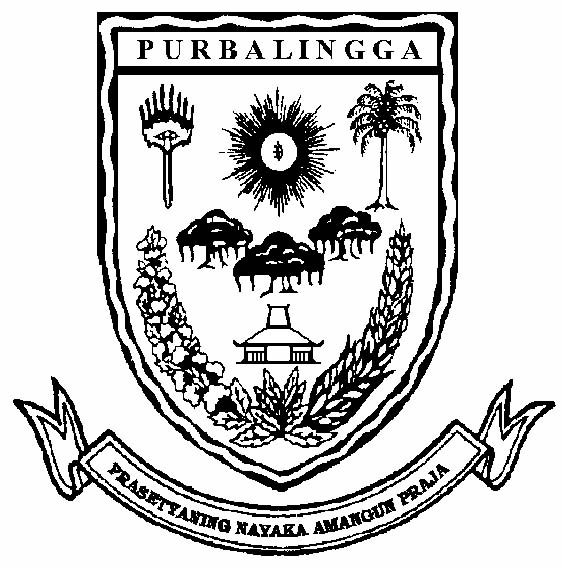
Diundangkan di Desa : Dagan

Pada Tanggal : 4 Januari 2017

Sekretaris Desa

SUTARYO, S.Sos.

LEMBARAN DESA DAGAN TAHUN 2017 Nomor : 2

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( B P D )**

**DESA DAGAN KECAMATAN BOBOTSARI**

**KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( B P D )

DESA DAGAN KECAMATAN BOBOTSARI

Nomor : 02/BPD/I/2017

Tanggal : 2 Januari 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA

MENJADI PERATURAN DESA DAGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA DAGAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa Rancangan Peraturan Desa Dagan Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 usulan Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 perlu mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa Dagan; 2. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf “a” diatas maka Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dagan. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5539);  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana  Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5558);  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun  2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Lembaran  daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 7 );  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun  2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun  2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun  2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan  Perangkat Desa;  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun  2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten  Kepada Pemerintahan Desa; |
|  |  |  |
| Memperhatikan | : | Pernyataan persetujuan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Dagan tanggal 2 Januari 2017. |
| MEMUTUSKAN | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DAGAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2017.  Pasal 1  Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Dagan tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Desa.  Pasal 2  Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Dagan

Pada tanggal : 2 Januari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA DAGAN

KETUA,

JOKO PRANOTO, S.Sos

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Desa Dagan

2. Sdr. Anggota BPD Desa Dagan

3. Pertinggal